

Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)

Fauziatul Ifa¹, M. Surya Darmawan², Asropi³

Politeknik STIA LAN Jakarta

Fauziatulifa4@gmail.com¹, suryakirana21@gmail.com²

Abstract

The objectives of this research are to describe best practices and innovations in the Rice Commodity Balance Policy through the National System of Commodity Balance (SINAS-NK), analyse the prerequisites for success, and identify challenges in the Rice Commodity Balance Policy Innovation through the National System of Commodity Balance (SINAS-NK). This research uses a descriptive qualitative approach, using primary data collected through in-depth interviews and secondary data taken from reports, articles, and the internet to fill in the gaps left by the interviewees. The theoretical concept to assess a best practice uses the theory (Prasojo, Eko, 2007) with several criteria. The results of this study found an impact on structuring an integrated trade system, producing collaborative governance or business partnerships between importers and exporters, especially rice commodities, innovations that are very beneficial for the government, business actors, producers, and the community and have a strong legal umbrella, as well as high leadership commitment from each Ministry / Institution such as the Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade, National Food Agency, BULOG, INSW, and Central Bureau of Statistics to provide accurate and accountable data. Some of the challenges and obstacles of Rice Commodity Balance Policy Innovation through the National System of Commodity Balance (SINAS-NK) found include the readiness and commitment of all stakeholders, commodity detailing, socialisation of application use, accuracy of initial stock and stock data, and no separation of total general and industrial rice stocks.

Keywords: *Best Practice, Inovation, Public Policy, SINAS NK, Rice*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *best practice* dan inovasi dalam Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK), menganalisis prasyarat keberhasilan, dan mengetahui tantangan dalam Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diambil dari laporan, artikel, dan internet untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh narasumber yang diwawancarai. Konsep teori untuk menilai sebuah *best practice* menggunakan teori (Prasojo, Eko, 2007) dengan beberapa kriteria. Hasil dari penelitian ini ditemukan dampak pada penataan sistem tata niaga yang integrasi, menghasilkan *colaborative governance* atau kemitraan bisnis antara importir dan eksportir khususnya komoditas beras, inovasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat, serta adanya komitmen pimpinan yang tinggi dari masing-masing Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statistik yang untuk menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa tantangan dan hambatan Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) yang ditemukan antara lain kesiapan dan komitmen semua stakeholders, pendetailan komoditas, sosialisasi penggunaan aplikasi, akurasi data stok awal dan stok dan belum dilakukan pemisahan total stok beras umum dan industri.

Kata Kunci: *Best Practice; Inovasi; Kebijakan Publik, SINAS NK, Beras*

PENDAHULUAN

Di era baru revolusi industri 4.0 diantara banyak hal yang menjadi perhatian utama dalam kehidupan modern adalah kemajuan sektor pertanian dan perdagangan Indonesia. Perusahaan perlu berinovasi jika mereka ingin bertahan dan berkembang di dunia globalisasi saat ini dan persaingan perusahaan yang semakin ketat (Aidhi, 2023). Bagaimana Inovasi Bekerja? Sesuatu biasanya harus berevolusi, entah itu dalam masyarakat, perdagangan, teknologi, atau bidang lainnya. Kami menyebutnya inovasi. Konsep, prosedur, atau instrumen adalah bagian penting dari inovasi. Banyak kemitraan yang tidak kuat dalam hal melakukan atau meningkatkan inovasi karena hal tersebut tampaknya tidak menjadi prioritas utama (Cetindamar, 2008).

Ada banyak jenis inovasi yang ada, dan kategorisasi mereka dapat berubah tergantung pada apa yang sebenarnya diinovasi. Ekosistem, barang, jasa, model bisnis, prosedur, organisasi, pengaturan kelembagaan, dan sistem sosial-budaya merupakan contoh-contoh jenis inovasi yang ada. Barang dan jasa baru tentu saja merupakan bagian dari inovasi, tetapi tidak hanya itu saja (Fajrina, 2022). Perubahan pada prosedur, kebijakan, dan bahkan etos organisasi secara keseluruhan juga merupakan bagian dari inovasi.

Dengan munculnya teknologi baru, perubahan selera pelanggan, dan kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi, kemampuan SDM untuk mendorong inovasi organisasi menjadi lebih penting dari sebelumnya (Alamsyah, 2024). Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk budaya perusahaan yang mendorong transparansi, kerja sama tim, dan pengambilan risiko. Hasilnya, mereka membuka jalan bagi kelompok-kelompok untuk menghasilkan konsep-konsep baru, seperti memperbaiki kebijakan seputar kebutuhan paling mendasar masyarakat-pangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas gizi yang cukup sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan prasyarat bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. (Undang-Undang Pangan No. 18/2012).

Badan Pangan Nasional memperkirakan bahwa pada tahun 2023, konsumsi beras per kapita per tahun di Indonesia akan mencapai 81,23 kg. Meskipun meningkat dari lima tahun sebelumnya, konsumsi beras per kapita Indonesia pada tahun 2023 turun 0,15% dari tahun 2022. Meskipun ada kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi beras per kapita Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mengonsumsi beras. Dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia memiliki konsumsi beras per kapita yang lebih rendah, yaitu hanya sekitar 81 kg/kapita/tahun (OECD-FAO 2018).

Menurut Jiuhardi (2023), strategi pemerintah untuk mengimpor beras adalah untuk menjaga harga pangan tetap stabil dalam waktu dekat, menjaga pasokan pangan tetap stabil, dan menjaga daya saing produksi beras lokal dengan membebaskan pajak pada beras yang masuk. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, impor beras pada tahun 2024 terdiri dari impor beras khusus sebanyak 33.701 ton, beras industri sebanyak 412.060 ton, dan beras umum (penugasan Perum BULOG tahun 2024 sebanyak 3.600.000 ton dan sisa penugasan tahun 2023 sebanyak 304.231,15 ton).

Terdapat tiga area utama pencegahan korupsi di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Bidang-bidang tersebut meliputi perizinan dan perdagangan, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Strategi ini berfungsi sebagai panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2018 sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 54/2018).

Neraca komoditas didefinisikan sebagai statistik dan informasi yang merinci keadaan produksi dan konsumsi komoditas tertentu untuk keperluan industri dan publik selama periode waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dan diterapkan di tingkat nasional, berdasarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Sistem Nasional Neraca Komoditas SINAS-NK adalah subsistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemrosesan dokumen ekspor dan impor, termasuk yang berkaitan dengan karantina, perizinan, bea cukai, pelabuhan, dan bandara. Sistem ini juga menjamin keamanan data dan informasi serta secara otomatis mengintegrasikan aliran dan proses informasi antar sistem internal dalam rangka mempersiapkan dan mengimplementasikan neraca komoditas.

Terdapat kurangnya integrasi dalam Kebijakan Pengendalian Ekspor-Impor antara Kementerian/Lembaga dan Sistem Layanan yang berbeda sebelum adanya SINAS-NK. Dalam hal persyaratan impor/ekspor, tidak ada referensi data yang standar. Oleh karena itu, pengaturan ekspor dan/atau impor sangat penting untuk mengintegrasikannya ke dalam satu set data yang dapat diandalkan. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang akibat perizinan ekspor dan impor yang tidak transparan. Selain itu, kebijakan ekspor dan impor disinyalir tidak tepat waktu dan jumlah sehingga tidak memberikan kepastian dan merugikan pelaku usaha.

Berikut tampilan data Prognosa Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2019 sebelum adanya SINAS NK data tersebut belum transparan dan hanya dapat diketahui oleh Kementerian Pertanian sebagai penyedia data produksi beras:

Tabel 1. Prognosa Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2019

Bulan	Perkiraan Produksi Beras Kotor	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Domestik (Bulanan)	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
1	2	3	4 = 2-3	5= stok awal+4
Stok Awal				2.174.626
Jan-19	2.468.530	2.482.359	(13.829)	2.160.797
Feb-19	4.286.991	2.482.359	1.804.632	3.965.429
Mar-19	7.383.635	2.482.359	4.901.276	8.866.705
Apr-19	6.011.530	2.482.359	3.529.171	12.395.876
Mei-19	3.188.051	2.535.210	652.842	13.048.717
Jun-19	3.677.463	2.548.556	1.128.907	14.177.625
Jul-19	4.360.637	2.482.359	1.878.278	16.055.903
Agu-19	4.113.704	2.484.361	1.629.343	17.685.245
Sep-19	2.920.604	2.482.359	438.244	18.123.490
Okt-19	2.917.067	2.482.359	434.708	18.558.198
Nov-19	2.803.429	2.482.359	321.070	18.879.267
Des-19	3.392.960	2.484.762	908.198	19.787.466
Total 2019	47.524.604	29.911.764	17.612.840	19.787.466

Sumber : Kementerian Pertanian

Setelah adanya SINAS NK data Stok Awal, Produksi, Kebutuhan, Impor, dan Stok Akhir beras telah transparan dan bisa diakses oleh Kementerian/Lembaga terkait. Usulan perubahan stok akhir 2023 akan menjadi stok awal 2024. Berikut tampilan Dashboard SINAS NK:

Tabel 2. Dashboard Sinas-NK

Uraian (Satuan: Ton)	Penetapan 7 Des 2023	Perubahan 5 Feb 2024	Usulan Perubahan 5 Juni 2024
Stok Awal	7.899.684	7.899.684	4.134.399⁽¹⁾
Produksi	32.001.257	32.001.257	32.001.257
Beras Umum	31.833.552	31.833.552	31.833.552
Beras Ketan	159.374	159.374	159.374
Beras Tarabas	1.163	1.163	1.163
Beras Aromatik	7.168	7.168	7.168
Kebutuhan	31.214.805	31.214.805	31.214.805
Impor	2.445.761	4.045.761	4.045.761
Beras Khusus	33.701	33.701	33.701
Beras Industri	412.060	412.060	412.060
Beras Umum	2.000.000	3.600.000	3.600.000
Stok Akhir	11.131.897	11.131.897	8.966.612⁽²⁾

Sumber: diakses dari SINAS NK per 4 Juni 2024

SINAS-NK bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap barang konsumsi dan bahan baku untuk keperluan industri, menyederhanakan dan meningkatkan transparansi perizinan baik di sektor ekspor maupun impor, menyediakan data yang akurat dan komprehensif untuk kebijakan ekspor dan impor, memastikan dunia usaha dapat berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, menyederhanakan dan meningkatkan perizinan di kedua sektor tersebut, dan mendorong penyerapan komoditas yang mempertimbangkan kepentingan petani, nelayan kecil, petambak kecil, dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya. Data dan layanan yang terintegrasi melalui satu platform, kepastian waktu, jumlah, dan biaya, kesederhanaan proses perdagangan, peningkatan keterbukaan, dan penghindaran korupsi merupakan kondisi yang diharapkan terjadi setelah adanya inovasi dalam pelaksanaan kebijakan SINAS-NK.

Inovasi kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS-NK menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan stok dan penyaluran beras di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada analisis kebijakan neraca komoditas secara umum dan evaluasi sistem informasi yang terpisah, penelitian ini secara spesifik menguji implementasi SINAS NK dalam konteks neraca komoditas beras. Penelitian ini mengintegrasikan teknologi dan kebijakan dengan mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi, dalam hal ini SINAS NK dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan neraca komoditas beras. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya menguji implementasi SINAS NK, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap transparansi, akurasi data, dan pengambilan keputusan terkait neraca komoditas beras. Penelitian ini membandingkan temuannya dengan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kontribusi unik SINAS NK dalam mengatasi tantangan yang ada dalam pengelolaan neraca komoditas beras.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *best practice* inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK), menganalisis prasyarat keberhasilan, dan mengetahui tantangan dalam implementasi Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).

KAJIAN LITERATUR

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan kajian literatur terdahulu sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian ini. Pada kajian literatur terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan baik dalam metode penelitian, hal-hal yang dianalisis, hasil analisis dan dan lain-lain sehingga setiap penelitian memiliki keunikan. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini adalah beberapa studi sebelumnya. Neraca Beras di Indonesia tahun 2011-2015 merupakan studi pertama yang ditulis oleh (Laksmiasri, 2017). Studi ini menggunakan data sekunder dengan metode kualitatif. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan neraca beras adalah produksi, konsumsi, impor, dan ekspor beras. Dari tahun 2011 hingga 2015, terdapat surplus 16-22 juta metrik ton beras di Indonesia, menurut analisis ini. Beberapa provinsi memiliki kelebihan beras tetapi masih membelinya dari provinsi lain, sementara provinsi lain mengalami kekurangan tetapi menjualnya ke negara lain.

Penelitian berikutnya telah dilakukan oleh Krishnamurthi et al. (2021) dengan Judul Neraca Ketersediaan Beras di Kalimantan Timur sebagai Calon Ibokota Baru. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan ketersediaan beras dan membangun model neraca ketersediaan beras di Kalimantan Timur. Pendekatan sistem dinamik merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini bahwa subsistem penyediaan dan permintaan menjadi penentu neraca ketersediaan beras. Penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kondisi neraca ketersediaan beras yang dibangun dengan model dinamik memiliki validitas yang baik. Sedangkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yaitu kombinasi kebijakan dari sisi produksi dan konsumsi.

Analisis Neraca Ketersediaan Beras Pasca Banjir di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar merupakan subjek dari penelitian berikut yang dilakukan oleh Windyatama et al. (2023). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis neraca ketersediaan beras dan cadangan pangan khususnya padi (beras) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sesudah banjir. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder meliputi produksi, konsumsi, dan cadangan pangan khususnya padi (beras). Dalam penelitian ini dihasilkan ketersediaan beras mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebesar 792 ton dari tahun 2020-2021 yang disebabkan oleh banjir, sehingga diperlukan penyediaan Cadangan beras yang cukup untuk mengatasi situasi darurat sebesar 4.582 ton.

Selanjutnya telah dilakukan penelitian oleh Saihani dan Fitriannoor (2024) yang berjudul Keseimbangan Pasokan dan Permintaan dengan Analisis Neraca Beras di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari tahun 2017-2021 berupa data *time series* selama 5 (lima) tahun terakhir. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan adanya fluktuasi ketersediaan beras dari tahun ke tahun. Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan mengalami surplus beras hanya 1 kecamatan yang mengalami defisit dari total 10 kecamatan.

Inovasi Kebijakan Publik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Corona 19 (Covid-19) di Jawa Barat merupakan subjek dari penelitian berikut pada tahun 2020 oleh Muslim et. al dari Universitas Islam Negeri Bandung. Untuk menghasilkan gagasan yang konsisten dengan studi inovasi kebijakan publik, strategi penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan metodologi untuk menganalisis literatur tentang berbagai

kebijakan publik. Mencari berbagai sumber data sekunder dan menganalisisnya sesuai dengan gagasan dan teori inovasi kebijakan publik adalah pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mengkaji kebijakan pemerintah selama COVID-19 dan menemukan bahwa, secara umum, hal-hal yang dilakukan masih sama, mulai dari menangani penyebaran hingga dampak dari ide-ide baru untuk inovasi kebijakan publik yang dapat diimplementasikan, yang seharusnya dapat memberikan hasil yang lebih nyata dan lebih banyak keterlibatan masyarakat.

Analisis Praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan 'Kumis Mbah Tejo' di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta) menjadi subjek penelitian berikutnya oleh Eldo dan Mutiarin. Penelitian ini berusaha memahami komponen dampak, kerja sama, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas dalam kaitannya dengan implementasi ide praktik terbaik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini menemukan bahwa inovasi layanan yang ada saat ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat melihat dan merasakan pengaruh langsung dari inovasi tersebut, dan dapat mencapai kepuasan masyarakat meskipun aspek-aspek dasar analisis tidak sepenuhnya terpenuhi.

Studi berikut ini dilakukan oleh Afrizal et. al (2020) oleh para peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang dan diberi judul “*Best Practice* Inovasi Pelayanan Publik Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan”. Melalui penggunaan wawancara mendalam, observasi yang cermat, dan pencatatan yang teliti, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian inovatif ini telah menghasilkan hasil yang memenuhi standar praktik terbaik. Berkat laboratorium kemiskinan, dua dari tiga model desa tidak lagi diklasifikasikan sebagai desa merah.

Inovasi *E-Government* melalui *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merinci praktik-praktik tata kelola pemerintahan elektronik yang inovatif di Kabupaten Banyuwangi. Metodologi tinjauan literatur kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tata kelola pemerintahan yang baik dimajukan oleh inovasi *e-government* pemerintah daerah, menurut kesimpulan penelitian ini.

Dari analisis literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian deskriptif dan inovasi memiliki kesamaan. Di sisi lain, beberapa penelitian ini menggunakan metrik atau alat penilaian lain. Penelitian lain hanya meneliti pada kebijakannya saja, tidak ada penelitian yang berkaitan dengan inovasi sistem yang diprakarsai oleh SINAS-NK dalam kebijakan neraca komoditas beras yang ditemukan oleh para peneliti.

Promosi inovasi di dalam lembaga pemerintah merupakan aspek penting dari budaya birokrasi dalam hal reformasi birokrasi. West dan Far menjelaskan bahwa inovasi adalah pergeseran dari prinsip, proses, dan praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memiliki dampak yang signifikan terhadap cara baru dalam menjalankan manajemen (Ramdhani, 2012). Untuk membuat birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu melakukan penyesuaian, inovasi menjadi sangat penting (Asropi, 2019). Kemampuan inovasi suatu organisasi atau lembaga di sektor publik dapat diukur dari sejumlah faktor yang disebut sebagai dimensi inovasi, adapun dimensi inovasi yang dikembangkan di sektor publik menurut Halvorsen yang dikutip oleh (Suwarno, 2008) adalah sebagai berikut: a) inovasi konseptual, yang muncul dari pergeseran

pemikiran tentang suatu isu dan menemukan ekspresi dalam kebijakan; b) inovasi penyampaian, yang mencakup pendekatan baru untuk memberikan layanan, menata ulang metode interaksi dengan klien untuk memenuhi kebutuhan unik mereka; dan c) inovasi sistem. Inovasi adalah cara baru atau perubahan cara berinteraksi dalam organisasi atau sebagai bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.

Keadaan yang ada saat ini maupun di masa lalu tidak akan memungkinkan untuk berkembangnya inovasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep-konsep inovasi yang diberikan oleh (Suwarno, 2008): a) kemunculan relatif, b) kompatibilitas, c) kompleksitas, d) triabilitas, posibilitas, dan e) observabilitas, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitas. Dalam rangka melakukan inovasi tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir, serta mekanisme pengawasan yang melekat pada sektor pangan strategis khususnya komoditas beras, maka diatur Tata Kelola Perizinan Ekspor dan Impor berdasarkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan-NK).

Kriteria yang digunakan sebagai alat ukur dalam praktik terbaik dalam Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas melalui SINAS-NK antara lain yang ditulis oleh Prasajo (2007): (1) Dampak, sebuah praktik terbaik harus menunjukkan dampak positif baik bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lain, (2) Kerjasama, landasan dari setiap praktik terbaik haruslah merupakan upaya kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, dengan minimal dua entitas yang saling bergantung, (3) Keberlanjutan, sebuah praktik terbaik haruslah membawa perubahan yang mendasar di bidang legislasi, kebijakan sosial, kerangka kerja kelembagaan, serta efisiensi, transparansi dan manajemen yang akuntabel, (4) Kepemimpinan, sebuah praktik terbaik haruslah digerakkan oleh komitmen para pemimpin yang mengilhami aksi dan perubahan, termasuk perubahan kebijakan publik yang diambil.

METODE PENELITIAN

Strategi deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian dalam penelitian ini. Penelitian yang menggunakan metodologi ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) berkontribusi terhadap inovasi kebijakan neraca komoditas beras.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan tinjauan literatur yang relevan. Dengan membuat garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, studi ini memanfaatkan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan *key informan* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung mengenai Kebijakan Neraca Komoditas Beras melalui SINAS-NK. Hasil wawancara yang didapatkan merupakan data primer, sementara laporan, artikel, dan penelusuran web merupakan data sekunder. Data primer dan data sekunder tersebut dianggap relevan dengan topik yang dibahas.

Studi ini bertujuan untuk menjawab tantangan seputar inovasi kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS-NK dengan menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur. Adapun *key informan* dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Asisten Deputy Pangan, dan Asisten Deputy Peternakan dan Perikanan dari Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai Inovasi Neraca Komoditas Beras melalui SINAS-NK.

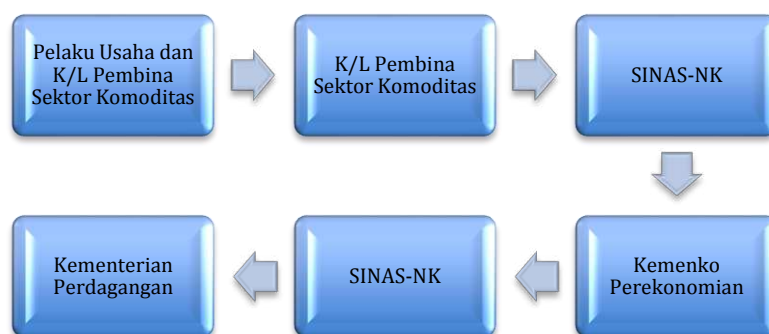
HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi *Best Practices* Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)

Beberapa kriteria Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui SINAS-NK dari sudut pandang administrasi publik: a) inovasi proses, yang meliputi sistem ekspor impor yang terintegrasi dan transparan; b) inovasi berbasis produk, yang meliputi pembaharuan berbagai masalah seperti pembuatan sistem aplikasi SINAS-NK; dan c) inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang berbasis pada produk dan dapat dikatakan SINAS-NK merupakan produk baru yang belum pernah ada (Sururi, 2017).

Dalam rangka memperlancar ekspor dan impor, kemudahan dan kepastian berusaha, ketersediaan barang konsumsi bagi masyarakat, penyerapan komoditas beras yang mengutamakan kepentingan petani, serta mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di dalam negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Layanan Nasional Satu Pintu (LNSW) mengembangkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK). Sistem ini mencakup data dan informasi mengenai konsumsi dan produksi komoditas tertentu, terutama beras, baik untuk kebutuhan industri maupun penduduk dalam periode waktu tertentu. Untuk melengkapi rencana kebutuhan neraca komoditas, pengguna dapat login dengan akun LNSW atau akun sistem K/L (dalam hal integrasi) di <https://neraca-komoditas.insw.go.id/>. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statistik merupakan beberapa kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan neraca komoditas beras.

Berikut Gambaran Proses Bisnis SINAS NK dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas:



Gambar 1. Proses Bisnis Sinas-NK

Sumber: Perpres No 61 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas

Gambar diatas menjelaskan proses bisnis dalam aplikasi SINAS NK yaitu dimulai dari usulan rencana kebutuhan oleh pelaku usaha melalui SINAS NK kemudian rencana kebutuhan tersebut di verifikasi oleh Kementerian/Lembaga Pembina dan ditetapkan Rencana Kebutuhan. Setelah Penetapan rencana kebutuhan selanjutnya dilakukan

permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PBUMKU) oleh pelaku usaha. Penerbitan PBUMKU Persetujuan Ekspor/Persetujuan Impor dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui SINAS NK dan dilaksanakan realisasi Ekspor/Impor.

Komoditas yang diatur dalam inovasi neraca komoditas melalui SINAS-NK selain beras yang ditetapkan melalui rapat koordinasi Menteri antara lain gula, daging lembu, garam, hasil perikanan, dan jagung. Pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Label Mutu Beras dijelaskan klasifikasi beras terdiri atas beras umum dan beras khusus. Selain itu dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dijelaskan juga beras industri, seperti yang diungkapkan oleh *key informan* berikut:

“Data untuk komoditas beras ada 3 (tiga) yaitu beras umum, beras khusus, dan beras industri. Data untuk beras industri dari Kementerian Perindustrian, beras khusus dari Badan Pangan Nasional dan BULOG berdasarkan beberapa usulan dari horeka dan importir, dasarnya permendag. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak pernah mencreate angka sebagai pemilik sistem SINAS-NK menjadi wasit pada saat terjadi, memastikan SINAS- NK berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifulloh selaku Asisten Deputi Pangan, 14 November 2024)

Realisasi impor beras berdasarkan SINAS NK dari total Persetujuan Impor 4.045.761 ton (semua jenis beras) telah terealisasi impor beras sebesar 1.809.935 ton (44,74%). Dari total Persetujuan Impor 3.600.000 ton, Penugasan impor beras Perum BULOG telah terealisasi 1.680.714 ton (46,69%). Berikut contoh gambaran data sebagian Perusahaan yang telah melakukan impor beras yang dapat diakses dalam SINAS NK:

Tabel 3. Contoh data Realisasi Impor Beras Sebagian Perusahaan Tahun 2024

Nama Perusahaan	Izin Terbit (ton)	Jumlah Realisasi	% Realisasi
Sang Hyang Seri	883	883	100
Perusahaan Perdagangan Indonesia	2.010	1.510	75.12
Dellifood Sentosa Corpindo	3.330	1.750	52.55
Union Food Lestari Abadi	1.145	600	52.40
BULOG	3.600	1.680	46.69
Alu Aksara Pratama	95.987	39.332	40.98
Sarinah	7.108	5.600	78.78
Robico	6.548	2.277	34.77
Budi Makmur Perkasa	146.187	48.070	32.88

Sumber: diakses dari SINAS NK per 4 Juni 2024

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa realisasi impor yang dilakukan oleh beberapa badan usaha dilakukan secara transparan yaitu dapat dipantau oleh berbagai pihak, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Prasyarat **Kebhasilan Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)**

Kriteria-kriteria yang dijadikan alat ukur dalam best practice Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) antara lain Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, INSW, Badan Pusan Statistik, dan

pihak lain yang terkait. dampak (*Impact*), Kemitraan (*Partnership*), keberlanjutan (*Sustainability*), kepemimpinan (*Leadership*) (Prasojo, 2007). Dalam membahas kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS NK berikut penjelasan berdasarkan kriteria *best practice* tersebut.

1. Dampak (*Impact*) inovasi,

Dampak yang terjadi dengan adanya inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pemerintah yang membuat dan melaksanakan kebijakan dapat tercapai, khususnya peran Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah. Menurut Pasal 58 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, peran Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis adalah memastikan bahwa semua kebijakan kementerian dan lembaga terkait pangan dan agribisnis, khususnya yang berkaitan dengan komoditas beras, dikoordinasikan dan dilaksanakan secara tepat waktu. Menurut pasal 127, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasi kebijakan kementerian dan lembaga yang terkait dengan perdagangan dan industri, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data, penyederhanaan dan transparansi proses perizinan di bidang ekspor dan impor, serta pelaksanaan dan pengendaliannya.

Hal tersebut diungkapkan juga dalam wawancara dengan *key informan* berikut hasil wawancaranya:

“Dampak dari SINAS-NK yaitu prosesnya lebih cepat walaupun masih banyak kendala, implementasi secara intensif, lebih transparan, dan sebagai sarana konsolidasi lembaga kementerian terkait, secara komprehensif, walaupun komoditi dilihat dari sudut pandang Kementerian/Lembaga terlibat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pusat Statistika”. (wawancara dengan Bapak Dida Gardera selaku Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, 12 November 2024).

Selain itu inovasi kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS-NK berdampak pada pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan produsen. Hal ini diungkapkan oleh *key informan* sebagai berikut:

“Indikator yang digunakan dalam kriteria impact ini dalam Inovasi antara lain pertama, penataan sistem tata niaga yang integrasi sehingga memudahkan pelaku usaha cukup sekali input sehingga sistem pelayanan tidak harus ke masing-masing kementerian/Lembaga, misalnya Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian. Dampak kedua selanjutnya, data stok, produksi, dan kebutuhan diketahui lebih pasti sehingga memudahkan proyeksi supply dan demand. Ketiga, dapat dilakukan pengendalian ekspor dan impor terhadap komoditas yang dibutuhkan dengan tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Keempat, dampak bagi pengambil kebijakan dapat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekaligus memitigasi hambatan yang terjadi. Kelima, bagi masyarakat terjamin penyediaan, distribusi, dan supply komoditas serta stabilitas harga. Keenam, bagi produsen di hulu (petani) memacu produksi untuk mensubstitusi impor dan meningkatkan ekspor sesuai standar mutu

dan spesifikasinya. (wawancara dengan Bapak Pujo Setio selaku Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan, 6 November 2024).

Dampak lain adanya inovasi SINAS-NK, Pemerintah dapat melakukan pengendalian impor dimana jika kebutuhan dalam negeri sudah dapat dipenuhi atau diproduksi sehingga dapat dikendalikan impornya, seperti kasus beras ketan yang sudah terpenuhinya produksi dalam negeri. Selain itu *key informan* berikut mengungkapkan dampak dari inovasi Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui SINAS-NK adanya kesepakatan data yang akan digunakan dalam kebijakan impor khususnya beras, sebagai berikut:

“Berapa kebutuhan pasokan dalam negeri bisa termonitor oleh para pihak dan kementerian. Kesepakatan data yang dijadikan baseline untuk mengambil keputusan, sebelum adanya inovasi SINAS-NK data antar Kementerian/Lembaga sangat berbeda ekstrim. Kalaupun harus impor sudah kesepakatan berbagai pihak. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifulloh selaku Asisten Deputi Pangan, 14 November 2024).

2. Kemitraan (*Partnership*),

Kemitraan atau kerjasama pada Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui SINAS-NK berupa kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan kemitraan bisnis antara importir dan eksportir. Seperti pendapat *key informan* berikut:

“Terbangun kemitraan bisnis antara importir/eksportir dalam penyediaan dan distribusi barang konsumsi dan bahan baku industri. Pelaku usaha terfasilitasi proses bisnisnya lebih transparan, pasti dan simplifikasi. Antar kementerian/lembaga terjalin komunikasi koordinasi dan sinergi dalam pemenuhan data dan perencanaan produksi”. (wawancara dengan Bapak Pujo Setio selaku Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan, 6 November 2024).

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan usulan rencana kebutuhan Neraca Komoditas Tahun 2024 dalam rapat koordinasi terbatas Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS), untuk melaksanakan survei stok beras akhir tahun 2023. Survei stok beras akhir tahun 2023 dengan *time reference* mengacu pada tanggal 31 Desember 2024 di 477 kabupaten/kota di 38 provinsi melalui pendekatan Probability Sampling, dengan sasaran sebanyak 45.457 sampel antara lain Produsen Padi, Rumah Tangga Konsumen, Penggilingan, Pedagang, Industri, Hotel, Restoran dan catering. Hasil estimasi survei stok beras nasional diperoleh sebesar 4.134.399 ton.

Selain itu salah satu *key informan* menjelaskan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang cukup baik bahwa:

“Kontrol semakin baik oleh para pemangku kepentingan baik regulator maupun operator, ketika persetujuan impor udah terbit dan penetapan angka SINAS-NK sudah diputusin kemudian terbit risalah sebagai dasar industri dan pihak lainnya untuk melakukan proses importir, Koordinasi dan harmoni kerjasama semakin baik dan sudah terdapat data official dan rencana kebutuhan

sampai november. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifulloh selaku Asisten Deputy Pangan, 14 November 2024).

3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pada aspek keberlanjutan SINAS-NK merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat. Inovasi kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS-NK ini akan terus berlanjut walaupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 rencana pengembangan nomenklatur Kementerian negara yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan komoditas pangan dan nonpangan, Pemerintah telah menyusun RPerpres tentang Perubahan Perpres No.61 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari *key informan* yaitu

“SINAS-NK sudah payung hukum Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, diterjemahkan lebih detail dari Kemenko Perekonomian dan dikawal oleh peraturan dari masing-masing kementerian teknis yang terlibat dalam SINAS-NK.” (wawancara dengan Bapak Dida Gardera selaku Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, 12 November 2024).

Selain itu ada hal lain yang diungkapkan oleh *key informan* terkait keberlanjutan SINAS-NK yaitu

“Apabila data yang disajikan oleh kementerian lembaga terfalsifikasi dengan baik maka neraca komoditas menjadi acuan pengendalian ekspor dan impor sekaligus menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Data lengkap yang tersaji dan terverifikasi sesuai dengan neraca pangan seperti beras berpeluang untuk ditingkatkan dan disimplifikasi proses penetapannya secara digital sehingga akan mempercepat proses bisnis secara keseluruhan”. (wawancara dengan Bapak Pujo Setio selaku Asisten Deputy Peternakan dan Perikanan, 6 November 2024).

Key informan berikut juga mengungkapkan harapan keberlanjutan dari inovasi SINAS-NK yaitu

“Inovasi SINAS-NK akan menjadi sistem yang selalu ada perbaikan sehingga publik percaya dengan sistem, pemerintah taat aturan, kontrol korupsi, pengendalian stabilisasi harga dan pasokan, harapan berlanjut sistem diperbaiki, pihak terkait semakin bertanggung jawab/kepedulian semakin meningkat. Program swasembada pangan akan menjadi early warning yang baik, kebutuhan dan pasokan bertambah. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifulloh selaku Asisten Deputy Pangan, 14 November 2024).

4. Kepemimpinan (*Leadership*)

Dalam aspek kepemimpinan diperlukan komitmen pimpinan yang tinggi dari pejabat yang berwenang dan pelaksana kebijakan untuk keberhasilan suatu inovasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas berupa

rekomendasi pencabutan izin berusaha ekspor dan impor yang telah diterbitkan dan perubahan neraca komoditas yang dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan key informan berikut:

“Komitmen pimpinan sangat tinggi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu sistem secara internal semua Kementerian/Lembaga semua berproses”. (wawancara dengan Bapak Dida Gardera selaku Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, 12 November 2024).

Selain itu adanya komitmen pimpinan yang tinggi dari masing-masing Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statistik yang terlibat dalam inovasi kebijakan Neraca Komoditas Beras melalui SINAS NK untuk menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan key informan berikut:

“Komitmen pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari pejabat berwenang dari masing-masing Kementerian/Lembaga dapat terukur dan dievaluasi sehingga menjadi bagian kinerja. Oleh sebab itu komitmen dan dukungan pelaksanaan SINAS-NK menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan inovasi SINAS-NK. Pelaksanaan komitmen pimpinan melalui rapat koordinasi. Pelaksanaan keberhasilan Neraca Komoditas memacu komitmen penyediaan data yang tepat dan akuntabel”. (wawancara dengan Bapak Pujo Setio selaku Asisten Deputy Peternakan dan Perikanan, 6 November 2024).

Key informan selanjutnya juga menjelaskan ada komitmen pimpinan yang tinggi terutama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar penetapan Rencana Kebutuhan dalam SINAS_NK berjalan tepat waktu, sebagai berikut:

“Komitmen pimpinan sangat bagus, sampai rapat koordinasi terbatas, Bapak Menteri sebagai pimpinannya, terdapat komitmen pimpinan yang tinggi, untuk memastikan bahwa proses sistem berjalan sesuai timeline. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifulloh selaku Asisten Deputy Pangan, 14 November 2024).

Tantangan dan Hambatan Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)

Pada penelitian ini ditemukan tantangan dari Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) yaitu (1) semua pihak baik pelaku usaha maupun aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi kebijakan SINAS-NK sangat dibutuhkan, oleh sebab itu kementerian dan lembaga harus melakukan sosialisasi dan fasilitasi sehingga proses bisnis dari tahapan awal hingga akhir tidak terkendala sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kinerja masing-masing pihak, (2) Komitmen untuk proses perizinan berikutnya (perizinan Impor Ekspor dari lembaga yang berwenang), dan (3) Kesiapan semua stakeholder melibatkan pelaku usaha, dari Kementerian Pembina tentu kapasitas dari pelaku usaha berbeda, dari pelaku usaha keterlambatan penyusunan

rencana kebutuhan, kepastian pelayanan publik (*service level agreement*) perlu ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan oleh instansi terkait.

Dalam Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) terdapat beberapa hambatan antara lain dari sisi regulasi ada beberapa hal yang perlu di detailkan misalnya untuk beberapa komoditas yang akan masuk sistem, sosialisasi pelaku usaha penggunaan aplikasi, akurasi data stok awal dan stok akhir disesuaikan pada saat perubahan neraca komoditas, ketersediaan waktu pimpinan pada saat rapat koordinasi, dan belum dilakukan pemisahan total stok beras umum dan industri untuk menghindari mis informasi.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) sudah berjalan baik dan walaupun masih ada beberapa tantangan dan hambatan. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari aspek dampak, kemitraan, keberlanjutan, dan kepemimpinan. Inovasi kebijakan neraca komoditas beras melalui SINAS-NK berdampak pada penataan sistem tata niaga yang integrasi, sehingga memudahkan pelaku usaha cukup sekali input, data stok, produksi, dan kebutuhan diketahui lebih pasti sehingga memudahkan proyeksi *supply* dan *demand*, bagi masyarakat terjamin penyediaan, distribusi, dan *supply* komoditas serta stabilitas harga, dan bagi produsen di hulu (petani) akan memacu produksi untuk mensubstitusi impor dan meningkatkan ekspor sesuai standar mutu dan spesifikasinya. Inovasi ini menghasilkan *colaborative governance* atau Kerjasama yang baik antar Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statistik dan adanya kemitraan bisnis antara importir dan eksportir khususnya komoditas beras. Pada aspek keberlanjutan SINAS-NK merupakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat. Komitmen pimpinan yang tinggi dari masing-masing Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statistik yang terlibat dalam inovasi kebijakan Neraca Komoditas Beras melalui SINAS NK untuk menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa tantangan dan hambatan Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) yang ditemukan antara lain kesiapan dan komitmen semua *stakeholders*, pendetailan komoditas, sosialisasi penggunaan aplikasi, akurasi data stok awal dan stok dan belum dilakukan pemisahan total stok beras umum dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

Adi, A., Rachmina, D., & Krisnamurthi, Y. B. (2021). Neraca Ketersediaan Beras Di Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibukota Baru Indonesia Dengan Pendekatan Sistem Dinamik. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 207-218.

- Afiah, S., Farida, A. S., & Muslim, J. (2020). Inovasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat. LP2M.
- Alamsyah, S. (2024). Integrasi Strategis: Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi terhadap Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 933-942.
- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118-134.
- Asropi, A. (2019). BUDAYA INOVASI DAN REFORMASI BIROKRASI. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(3), 04. <https://doi.org/10.31113/jia.v5i3.451>.
- Aras Solong. Muliadi. (2020). INOVASI PELAYANAN PUBLIK. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*.
- Cetindamar, D., & Ulusoy, G. (2008). Innovation performance and partnerships in manufacturing firms in Turkey. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 19(3), 332-345.
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156.
- Fajrina, F. N. (2023). *Pengaruh Inovasi Produk, Desain Produk, dan Kualitas Produk terhadap Keunggulan Bersaing pada Produk Maybelline di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hapsari, N. H., Sunarto, S., & Hadiati, H. (2024). Audit Komunikasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). *Jurnal Good Governance*, 49-66.
- Ir. Ni Nyoman Ari Mayadewi, M.P. (2011). Inovasi Teknologi Pada Komoditas Padi Bagi Keberlanjutan Pembangunan Pertanian. *Jurnal dwijen AGRO Vol. 2 No. 2*.
- Jamal, F. U., & Asmarianti, A. (2024). Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi Melalui Metode Survei di Poliklinik Gigi Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar. *Jurnal Good Governance*, 33-48.
- Jiuhardi. (2023). Analisis Kebijakan Impor Beras Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(1), 1-13.
- Laksdiasri, W., & Sukamdi, S. (2017). *Keseimbangan Neraca Beras di Indonesia Tahun 2011–2015*. Gadjah Mada University.

Maria Ulfa Batoebara. (2021). Inovasi Dan Kolaborasi Dalam Era Komunikasi Digital. Jurnal Publik Reform Edisi 8.

Marsitadewi, K. E., & Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. Jurnal Good Governance, 19-32.

Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2007). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Birokrasi, Studi di Kabupaten Sragen.

Ramdhani, N., Ancok, D., Swasono, Y., & Suryanto, P. (2012). Teacher quality improvement program: Empowering teachers to increasing a quality of Indonesian's education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 69, 1836-1841.

Saihani, A., & Fitriannoor, R. (2024). Keseimbangan Pasokan dan Permintaan: Analisis Neraca Beras di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai, 21-26.

Saputra, Y. A., & Pratama, M. R. (2023). Inovasi E-Government Melalui Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 7(1), 30-47.

Septian Wahyudi. (2019). Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka. Jurnal Valuta Vol.5 No.2.

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya *Good Public Policy Governance*. Journal Spirit Publik.

Tjahyono, H. H., & Darto, M. (2024). Manusia, Proses, dan Teknologi sebagai Komponen Utama Penyelenggaraan Pelatihan bagi ASN secara Blended Learning. Jurnal Good Governance, 1-18.

Windyatama, F., Fauzi, M., & Nisa, A. F. (2023). ANALISIS NERACA KETERSEDIAAN BERAS PASCA BANJIR DI KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR. *Frontier Agribisnis*, 7(4).

Wismaningsih, K., Astuti, R. S., Dwimawanti, I. H., Puspo, B., & Afrizal, T. (2021). Best Practice Inovasi Pelayanan Publik 'Laboratorium Kemiskinan' Di Kabupaten Pekalongan. JUPIIS J. Pendidik. ILMU ILMU Sos, 13(1), 256.

Zuhruf, A. (2024). Transformational Leadership: Peran Pimpinan Dalam Transformasi Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Good Governance, 67-79.

Pustaka yang berupa judul buku:

Laksdiasri, W., & Sukamdi, S. (2017). Keseimbangan Neraca Beras di Indonesia Tahun 2011–2015. Gadjah Mada University.

Suwarno, Yogi, (2008). Inovasi di Sektor Publik. Cetakan ke-1. Jakarta: STIA-LAN Press.

Pustaka yang berupa Peraturan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Label Mutu Beras.

